

EFEKTIVITAS METODE DEBAT PADA PEMBELAJARAN**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN****Ernaliana****¹Wiraswasta, Mataram, Indonesia****²IAIN Mataram, Indonesia****Kata kunci:***Debat, pendidikan,
kewarganegaraan**Corresponding authors
email:ernalianarosyidi@
gmail.com***Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keefektifan metode debat dalam pembelajaran PKn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa metode debat memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menyampaikan ide, gagasan dan pandangan tentang persoalan kebangsaan. Metode debat juga melatih mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai demokratis yang tercermin dari perilaku mahasiswa yang menghargai, menghormati dan siap berbeda pendapat dalam segala hal apapun. Metode debat dalam pelaksanaannya menuai banyak hambatan diantaranya adalah mahasiswa belum memahami secara utuh materi yang diperdebatkan. Adapun secara keseluruhan metode debat dapat meningkatkan keberhasilan, motivasi belajar dan keberanian mahasiswa menyampaikan pendapat dimuka umum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, demikian kandungan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945, yang artinya setiap warganya wajib taat dan patuh terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Negara menjamin hak-hak warganya menjalankan aktivitas apapun selama tidak melanggar hak konstitusional orang lain. Negara tidak membedakan hak-hak istimewa bagi warganya, dengan kata lain setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang baik oleh negara. Demikian pula, negara juga memiliki hak untuk memaksa warganya menunaikan kewajibannya demi eksistensi negara.

Sebagai sebuah negara besar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan kedamaian sektoral Asia Tenggara. Kemampuan negara meyakinkan negara orang lain merupakan bagian yang sangat urgen dalam menjamin eksistensi Indonesia sebagai jantung Asia Tenggara. Sebagaimana amanah yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia harus turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Cita-cita dan harapan warga negara sebagai bangsa beradab dan berwibawa hanya akan menjadi khayalan semata manakala negara oleh warganya tidak mampu dikawal dengan optimal.

Dari pengantar di atas memberikan gambaran bahwa peran setiap warga negara sangat besar dalam mewujudkan negara yang modern, maju dan mandiri. Negara yang modern adalah negara yang dapat menyamai negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan negara

lainnya. Negara yang mandiri adalah negara yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan baik.

Untuk dapat menciptakan rasa bangganya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu dikembangkan sikap empati, simpati, nasionalisme dan kepedulian yang tinggi terhadap NKRI dan menjunjung tinggi pancasila sesuai dengan amanat yang terkandung didalamnya. Pengembangan perilaku pancasilais ini dapat dilakukan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dibidang pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya. Khususnya dibidang pendidikan, pendidik semaksimal mungkin dapat menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dalam setiap aktivitas kehidupannya.

Sebagai bagian yang bertanggungjawab diamanahkan negara sebagai pendidik di perguruan tinggi, dosen memiliki peran yang vital dalam merawat kebhinekaan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya produktif untuk merawat kebinekaan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan metode debat dalam pembelajaran PKn. Debat merupakan kegiatan mengadu penapat, argumentasi antara dua orang atau lebih baik secara individu maupun kelompok dalam mendiskusikan dan menetapkan suatu persoalan. Penerapan metode debat dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berbicara mahasiswa (Pratiwi: 2012: 193).

Metode debat merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengajarkan mata kuliah PPKn. Metode ini diterapkan untuk mengungkap pemahaman mahasiswa tentang materi PPKn, melatih keterampilan berbicara (*speaking skill*) dan mental mahasiswa. Pembelajaran dengan debat lebih efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan (Pamungkas, 2015: 1). Berdasarkan hal tersebut, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang metode debat dalam mengajarkan mata kuliah PKn.

Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Semangat perjuangan bangsa yang tidak kenal menyerah telah terbukti pada perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan ini menjadi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjelma berupa semangat yang menjadi kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam segala zaman, situasi dan kondisi. Karena nilai-nilai perjuangan bangsa itu selalu relevan dan handal serta efektif sebagai landasan memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Junaedi dkk, 2009: 1-8).

Kemakmuran nusantara mengundang bangsa lain untuk melakukan ekspansi dan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Oleh karena itu kedatangan Portugis dan menjajah Indonesia kemudian disusul oleh Spanyol sejak tahun 1596 sampai 1942. Belanda menguras habis kekayaan bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1595 (Trianto & Tutik, 2007: 11). Kondisi dan situasi bangsa Indonesia membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengawal dan menjamin kemerdekaan dapat diperoleh dengan baik.

Geger perjuangan dan perlawanan penjajah terus berkobar hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa proklamasi adalah sumber hukum bagi pembentukan negara yang terdiri atas suku bangsa, ras, agama dan golongan menjadi satu negara kesatuan (Trianto & Tutik, 2007: 31). Proses perjuangan dan revolusi yang panjang menjadikan Bangsa Indonesia sangat mengenal arti suatu persatuan dalam mengawal dan menjamin jalannya pemerintahan berjalan baik. Peristiwa ini kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dasar negara dan undang-undang Dasar 1945.

Kedudukan akan pentingnya sejarah adalah bagian yang terintegrasi dari sebuah peradaban kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia mengakui dan menjalankan amanah pejuang dan pendiri bangsa untuk selalu berusaha mewujudkan cita-cita mereka sebagai bangsa besar yang berdaulat dan berdikari.

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berakhlak sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. (Modul Kuliah, 2007: iii). Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi termasuk dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Arif, 2012: i).

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang di kenal dengan Mata Pelajaran Civic di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari “*Civic Education*” sebagai “*the Body Of Knowledge*”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan (*the Body of Knowledge*) diarahkan untuk membangun masyarakat demokrasi beradab. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar hukum yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terkait pendidikan kewarganegaraan, beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli sebagai berikut;

Menurut Cogan dalam arief (2012: 1)), “*...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Lebih luas Cogan kembali menerangkan bahwa pendidikan kewarganegaraan “*...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*” inti dari pendapat Cogan di atas bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah yang mencakup pengalaman belajar pada komunitas mereka agar dapat berperan aktif pada masyarakatnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah, pendidikan kewarganegaraan ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami & mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila & UUD 1945. Senada dengan itu, Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan nation and *character building*.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada intinya adalah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkarakter, memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan membentuk dan membangun karakter masyarakat Indonesia yang baik.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Menurut Winata Putra dalam Masyhuri dan Yuliatin menerangkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengemban tiga fungsi pokok yaitu; (a) mengembangkan kecerdasan warga negara, (b) membina tanggung jawab warga negara, (c) mendorong partisipasi warga negara.

Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyebutkan tujuan PKn, dua diantaranya adalah sebagai berikut; (1) membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik ditingkat lokal, nasional, regional dan global, (2) menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangatlah mulia, mendidik masyarakat mencintai persatuan dengan tidak mengabaikan perbedaan.

3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan di PGMI

Materi pendidikan kewarganegaraan sangat luas, karena mencakup berbagai hal kehidupan manusia. Lebih jelasnya dijelaskan sebagaimana yang dikutip pada modul perkuliahan PGMI sebagai berikut;

1. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), meliputi: pembahasan latar belakang pentingnya PKn, landasan yuridis dan ilmiah diselenggarakan pendidikan PKn, pengertian, ruang lingkup, kompetensi dan tujuan PKn.
2. Konsep, nilai, norma dan moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang meliputi: pembahasan makna konsep, nilai, norma, moral yang terdapat pada PKn, dan keterkaitan hubungan nilai, norma dan moral di dalam materi PKn.
3. Konsep masyarakat, bangsa dan negara, meliputi: pembahasan pengertian masyarakat, bangsa dan negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, hubungan agama menurut Islam, dan hubungan negara dan negara di Indonesia.
4. Hak dan kewajiban warga negara, meliputi: pembahasan pengertian warga Negara, status kewarganegaraan, cara memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia, dan pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
5. Demokrasi di Indonesia, meliputi: pembahasan pengertian, hakikat dan unsur-unsur demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, sejarah perkembangan dan pelaksanaan

demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama secara demokrasi dan demokrasi dalam perspektif Islam.

6. Identitas nasional, meliputi: pembahasan konsepsi identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, karakteristik identitas nasional, nasionalisme di Indonesia, dan unsur-unsur nasionalisme serta usaha-usaha meningkatkan nasionalisme di Indonesia.
7. Integrasi nasional dan toleransi di Indonesia, meliputi: pembahasan integrasi nasional, tahap-tahap menuju integrasi nasional, pengertian toleransi, pentingnya toleransi, usaha-usaha menuju toleransi yang hakiki.
8. Kedudukan dan fungsi Pancasila, meliputi: pembahasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara, Pancasila sebagai ideologi Negara, Pancasila sebagai jiwa dan Paket 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 1-15 Pendidikan Kewarganegaraan kepribadian bangsa dan cara mengaktualisasikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa
9. Konstitusi negara, meliputi: pembahasan pengertian dan hakikat konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, pembagian dan klasifikasi konstitusi, nilai yang terkandung dalam konstitusi, sejarah konstitusi di Indonesia dan perubahannya, lembaga kenegaraan di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
10. Otonomi Daerah (OTODA) di Indonesia, meliputi: pembahasan pengertian dan hakikat otonomi, deskonsentrasi dan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda), visi otonomi daerah, sejarah otonomi daerah di Indonesia, pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Ketahanan nasional, meliputi: pembahasan latar belakang ketahanan nasional, pengertian, konsepsi, landasan, sifat dan fungsi ketahanan nasional, serta masalah global yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Hak-hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hukum di Indonesia, meliputi: pembahasan pengertian dan ruang lingkup HAM, perjuangan HAM dalam tatanan global, penegakan HAM di Indonesia, konsepsi dan prinsip-prinsip rule of law.
11. Pluralisme dan gender, meliputi: pembahasan konsep pluralisme, pelapisan sosial sebagai ciri pluralisme, pluralisme dalam perspektif Islam, konsep gender, gender sebagai fenomena sosial budaya, bias gender, gender menurut Islam.
12. Masyarakat madani (Khoirul Ummah), meliputi: pembahasan konsep masyarakat madani, fungsi masyarakat madani dalam suatu negara, prinsip-prinsip masyarakat madani, dan nilai-nilai masyarakat madani.

Metode debat dalam pembelajaran PPkn

Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Debat>), Keunggulan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Debat adalah sebagai berikut; (1) Memantapkan pemahaman konsep siswa

terhadap materi pelajaran yang telah diberikan, (2) Melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan, (3) Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat (<https://idtesis.com/metode-pembelajaran-debat/>)

Pembentukan pola pikir kritis dan kerja sama antar kelompok dapat lebih ditingkatkan dengan menerapkan model pembelajaran debat di kelas. Kelebihan model ini lebih banyak mengeksplorasi kemampuan siswa dari segi intelektual dan emosi siswa dalam kelompok kerjanya, sehingga pembentukan kerja sama antarsiswa, pola pikir kritis, dan pemahaman etika dalam berpendapat dapat diperoleh dalam pembelajaran di kelas.

Namun disamping berbagai kelebihan yang diberikan oleh model pembelajaran debat ini, ada beberapa kekurangan yang memerlukan peran dari seorang guru untuk mereduksinya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan efektivitas metode pembelajaran debat dalam meningkatkan partisipasi siswa. (<https://idtesis.com/metode-pembelajaran-debat/>)

PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di PGMI IAIN Mataram di semester satu. Perkuliahan ini sangat penting karena muatan materi yang disampaikan dikelas ini juga akan diajarkan setelah tamata nanti. Terkait hal ini beberapa informan menyampaikan bahwa bagi kami pembelajaran PKn ini sangat penting untuk melatih kami memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana menjadi warga negara yang baik.

Dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan debat aktif, mahasiswa lebih berani menyampaikan gagasannya, mengemukakan pendapat secara logis. Metode debat melatih siswa untuk berfikir dan menyampaikan sesuatu secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh semua mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut.

Pemahaman mahasiswa tentang debat sebagai suatu upaya untuk bertukar ide dalam pembelajaran PKn sangat baik. Debat juga dapat menjadi salah satu motivasi mahasiswa untuk lebih banyak mengkaji lebih mendalam tentang materi yang disampaikan. Dalam debat tersebut, mahasiswa tidak hanya merasa pendapatnya sendiri yang paling baik, namun dipahami bahwa semua gagasan memiliki makna baik manakala ditafsirkan dengan cara yang baik.

Keunggulan metode debat aktif sebagai wadah penyampaian gagasan di kelas disampaikan oleh Jamil Suprihatiningrum dalam Suwondo dan Suyoto (2016: 5) : a) menghidupkan suasana kelas; b) melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain dan mematuhi aturan kelompok; c) meningkatkan rasa percaya diri siswa; d) Memberi kesempatan siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan mandiri; e) mendorong siswa untuk menyumbang pikirannya untuk memecahkan masalah; f) meningkatkan prestasi siswa; g) mempermudah pemahaman materi; dan h) merangsang

siswa untuk berpikir kritis dan memutuskan pemecahan masalah. Debat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan kapasitas dan keterampilan mahasiswa.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa sangat antusias dan komunikatif dalam menyampaikan gagasannya. Pemberian materi tentang materi PKn dengan debat mewujudkan mahasiswa yang bersifat demokratis. Sikap dan perilaku demokratis merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai demokrasi. Metode debat di kalangan mahasiswa tidaklah seperti debat yang ngotot ngototan. Debat yang ayem, dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui panduan dosen.

Tema debat dalam penelitian ini adalah menyangkut materi pluralisme dan gender. Tema ini sangat menarik untuk didiskusikan, mahasiswa terbagi dalam dua kelompok debat yaitu kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Dosen memberikan pengantar tentang materi tersebut kemudian mencabut lot bagi yang pro dan kontra. Metode ini sangat baik untuk diajarkan kepada mahasiswa untuk menjamin keberhasilan dosen dalam menyampaikan materi ajar dengan baik.

Ketepatan metode dalam menyampaikan materi ajar memberikan motivasi belajar pada mahasiswa. Karena kalau metode yang digunakan tepat maka esensi dari materi yang disampaikan sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Penggunaan metode debat dalam pembelajaran menghindari mahasiswa dari rasa bosan dan jenuh saat belajar

Keberhasilan belajar dengan metode debat juga disampaikan oleh mahasiswa bahwa metode debat memberikan pencerahan kepada kami tentang suatu materi yang diperdebatkan. Sebenarnya, dengan metode tersebut dapat menciptakan fokus pada materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, guru terlebih dahulu menyiapkan materi debat dengan baik. Dan agar dapat terkendali, guru membuat aturan debat yang tidak dilanggar oleh kelompok tersebut. Secara teknis juga, dikemukakan aturan waktu penyampaian materi debat juga diatur sehingga tidak ada mahasiswa yang kelebihan atau kekurangan waktu dalam menyampaikan gagasannya.

Beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan debat diantaranya adalah sebagai berikut; (1) suasana pendukung kelas sulit dikendalikan, (2) seringkali partner debat tidak cukup memahami materi yang diperdebatkan, (3) atribut debat seperti memukul meja dan lain sebagainya sehingga kualitas suara kurang terlalu jelas, (4) lawan debat sering menyerang dengan argumen pribadi. Hambatan-hambatan ini senantiasa diantisipasi oleh dosen yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah antisipatif seperti memberikan peringatan bagi mahasiswa yang mengganngu terlaksananya debat.

Langkah terakhir setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode debat adalah evaluasi. Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa metode debat dalam pembelajaran PKn sangat efektif untuk menyampaikan sebuah gagasan dan materi tentang pluralisme dan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa debat merupakan metode yang cocok diterapkan pada pembelajaran PKn. Metode debat memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menyampaikan ide, gagasan dan pandangan tentang persoalan kebangsaan. Metode debat juga melatih mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai demokratis yang tercermin dari perilaku mahasiswa yang menghargai, menghormati dan siap berbeda pendapat dalam segala hal apapun. Metode debat dalam pelaksanaannya menuai banyak hambatan diantaranya adalah mahasiswa belum memahami secara utuh materi yang diperdebatkan. Adapun secara keseluruhan metode debat dapat meningkatkan keberhasilan, motivasi belajar dan keberanian mengutarakan pendapat dimuka umum.

REFERENSI

- Dikdik Baehaqi Arif, *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012
- Haris Suwondo Dan Suyato, Pengaruh Penggunaan Metode Debat Aktif Dalam Pembelajaran Konsep Demokrasi Mata Pelajaran Pkn Terhadap Sikap Demokratis Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 4 Depok. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 2016.
- <http://www.umsida.ac.id/tinymcepuk/gambar/file/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>. Modul kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dalam. diakses tanggal 16-12-2016 jam 02. 19 WITA.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Debat>
- <https://idtesis.com/metode-pembelajaran-debat/>
- Ida Ayu Ekayudha Pratiwi, Peningkatan Keterampilan Berbicara Dengan Metode Debat Plus Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Siswa Kelas Xiipa Sma Pariwisata Kertha Wisata Denpasar. Tesis. Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2012.
- ICCE UIN. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada Media, 2003.
- Junaedi, dkk. Modul perkuliahan Pendidikan kewarganegaraan edisi pertama. Learning Assistance Program for Islamic Schools Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 2009.
- Nova Tri Pamungkas, Efektivitas Penggunaan Metode Debat Aktif Terhadap Pemahaman Siswa Pada Keunggulan Iklim Di Indonesia Mata Pelajaran Ips Terpadu Kelas Viii Smp N 2 Colomadu, Skripsi: Fkip Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 tentang Sistem Pendidikan Nasional.